PENGADILAN TINGGI BENGKULU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2026

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Bengkulu - Bengkulu 38225

Telp. 073621585 Fax. 073621585

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan

Telp. 073621585 Fax. 073621585

Bengkulu - Bengkulu 38225

E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bengkulu, 22 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

Yurni Hendarwati, S.Pd
NIP. 197010121992032001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar 1
Daftar Isi 3
Daftar Tabel dan Lampiran 6
Pernyataan Tanggung Jawab 9
Ringkasan 10
I. Laporan Realisasi Anggaran 14
II. Neraca 16
III. Laporan Operasional 19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 21
V. Catatan atas Laporan Keuangan 23
A. Penjelasan Umum 23
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu 23
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 24
A.3. Basis Akuntansi 24
A.4. Dasar Pengukuran 25
A.5. Kebijakan Akuntansi 25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 33
B.2. Belanja 34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 41
C.1. Aset Lancar 41
C.2. Aset Tetap 43
C.3. Aset Lainnya 48
C.4. Kewajiban Jangka Pendek 49
C.5. Ekuitas 51
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 52
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 52
D.2. Beban Pegawai 52

D.3. Beban Persediaan 53
D.4. Beban Barang dan Jasa 54
D.5. Beban Pemeliharaan 54
D.6. Beban Perjalanan Dinas 55
D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 55
D.8. Beban Bantuan Sosial 56
D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 56
D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih 57
D.11. Beban Lain-lain 58
D.12. Kegiatan Non Operasional 58
D.13. Pos Luar Biasa 59
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 60
E.1. Ekuitas Awal 60
E.2. Surplus (Defisit) LO 60
E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar 60
E.4. Koreksi Menambah/Mengurangi 60
E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset 60
E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan 60
E.5. Transaksi Antar Entitas 62
Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2026 disajikan pada lampiran. 63
E.6. Ekuitas Akhir 64
F. Pengungkapan Penting Lainnya 65
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 65
F.2. Pengungkapan Lain-lain 65
Laporan-laporan Pendukung 67
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 68
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 70

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2026 dan 2025 10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 2025 11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang 28
Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 30
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 31
Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 33
Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 33
Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 dan 2025 34
Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 35
Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 35
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 36
Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 36
Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 37
Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 38
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2026 dan 2025 38
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 dan 2025 39
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2026 dan 2025 40
Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025 41
Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 41
Tabel 20 Rincian Uang Muka Belanja 42
Tabel 21 Rincian Piutang Bukan Pajak 42
Tabel 22 Rincian Aset Tetap 43
Tabel 23 Rincian Saldo Tanah 44
Tabel 24 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 48
Tabel 25 Rincian Aset Lainnya 49
Tabel 26 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 2025 50
Tabel 27 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga 50
Tabel 28 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2026 52
Tabel 29 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 52
Tabel 30 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 53
Tabel 31 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 54
Tabel 32 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 55
Tabel 33 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 55
Tabel 34 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 56
Tabel 35 Rincian Beban Bantuan Sosial 56
Tabel 36 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 57
Tabel 37 Rincian Beban Piutang tak Tertagih 57
Tabel 38 Rincian Beban Lain-lain 58
Tabel 39 Rincian Kegiatan Non Operasional 58
Tabel 40 Rincian Pos Luar Biasa 59
Tabel 41 Rincian Koreksi Nilai Persediaan 61

Tabel 42 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2026 61
Tabel 43 Rincian Koreksi Lain-lain 62
Tabel 44 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 62
Tabel 45 Rincian Transfer Masuk 63
Tabel 46 Rincian Pengesahan Hibah 63
Tabel 47 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026 69

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tinggi Bengkulu
Jl. Pembangunan No. 21 Padang Harapan Bengkulu - Bengkulu 38225
Telp. 073621585 Fax. 073621585 E-mail : pt_bengkulu@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bengkulu, 22 Juli 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

Yurni Hendarwati, S.Pd
NIP. 197010121992032001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Bengkulu Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2026 dengan realisasi nya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2026 s.d. 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.197.979.400,- atau mencapai 652 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp.30.343.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2026 adalah sebesar Rp.30.307.774.434,- atau mencapai 46 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.66.539.991.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2026 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026			TA 2025
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	30.343.000	197.979.400	652	21.523.402
Belanja Negara	66.539.991.000	24.100.416.850	46	12.861.980.520

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2026 dan 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp38.675.182.078,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp67.045.805,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp38.174.878.988,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0.; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp.5.997.999,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp2.578.264.223,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp2.578.264.223- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp.0. Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp35.669.658.569,-.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2026 dan 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2026	31 Desember 2025	Rp.	%
Aset				
Aset Lancar	**67.045.805**	**31.540.822**	**(9.358.592)**	**(29,67)**
Aset Tetap	**38.174.878.988**	**33.988.013.622**	**4.186.865.366**	**12,32**
Aset Lainnya	**5.997.999**	**0**	**5.997.999**	**0**
Jumlah Aset	38.247.922.792	34.019.554.444	4.228.368.348	12,439
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	**2.578.264.223**	**3.031.570.626**	**(454.306.403)**	**(14,95)**
Kewajiban Jangka Panjang	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Kewajiban	2.578.264.223	3.031.570.626	(454.306.403)	(14,95)
Ekuitas				
Ekuitas	**35.669.658.569**	**30.987.983.818**	**4.681.674.751**	**15,11**
Jumlah Ekuitas	35.669.658.569	30.987.983.818	4.681.674.751	15,11
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	38.247.922.792	34.019.554.444	4.228.368.348	12,43

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp22.486.925,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp25.651.972.457,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(25.629.485.532,-).

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp180.694.000,- dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(25.448.791.532,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp. 30.987.983.818,-. dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp.(25.448.791.532,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.(0-) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp30.130.466.283,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp35.669.658.569,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2026			TA 2025
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	30.343.000	197.979.400	652	21.523.402
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		30.343.000	197.979.400	652	21.523.402
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	42.230.193.000	24.100.416.850	57	11.540.001.633
2.	Belanja Barang	B.2.2.	3.132.798.000	1.607.056.182	51	1.321.978.887
3.	Belanja Modal	B.2.3.	21.177.000.000	4.600.301.402	22	0
	Jumlah Belanja Negara		66.539.991.000	30.307.774.434	46	12.861.980.520

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NERACA
PER 30 JUNI 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	31 Desember 2025
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	42.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1. 2.	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	2.863.575	0
Persediaan	C.1. 4.	22.182.230	31.540.822
Jumlah Aset Lancar		**67.045.805**	**31.540.822**
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	29.484.991.000	29.484.991.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4.742.549.424	4.965.278.091
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	10.058.527.219	10.058.527.219
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	8.680.950	8.680.950
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(10.705.321.007)	(10.529.463.638)
Jumlah Aset Tetap		**38.174.878.988**	**33.988.013.622**
Aset Lainnya	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3. 1.	261.095.480	2.006.814
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	(255.097.481)	(2.006.814)
Jumlah Aset Lainnya		**5.997.999**	**0**
Jumlah Aset		**38.247.922.792**	**34.019.554.444**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		

Utang kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	2.504.185.574	3.029.232.676
Utang yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	32.078.649	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4. 3.	0	2.337.950
Uang Muka dari KPPN	C.4. 4.	42.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**2.578.264.223**	**3.031.570.626**
Jumlah Kewajiban		**2.578.264.223**	**3.031.570.626**
EKUITAS			
Ekuitas	**C.5**	**35.669.658.569**	**30.987.983.818**
Jumlah Ekuitas		**35.669.658.569**	**30.987.983.818**
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		**38.247.922.792**	**34.019.554.444**

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	22.486.925	15.250.015
Jumlah Pendapatan		22.486.925	15.250.015
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	23.594.798.606	12.253.537.991
Beban Persediaan	D. 3	25.596.782	36.069.300
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.371.623.888	1.245.611.558
Beban Pemeliharaan	D. 5	142.525.707	472.257.272
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	90.168.188	60.597.450
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	427.259.286	456.341.331
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		25.651.972.457	14.680.658.421
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(25.629.485.532)	(14.665.408.406)
Kegiatan Non Operasional	D. 12		
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		180.694.000	7.817.000
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		180.694.000	7.817.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(25.448.791.532)	(14.657.591.406)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(25.448.791.532)	(14.657.591.406)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI BENGKULU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2026 DAN 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Ekuitas Awal	E.1	30.987.983.818	35.542.565.793
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.2	(25.448.791.532)	(14.657.591.406)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E.3	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.4	0	(655.415.037)
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.1	0	0
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.4.2	0	397.604.219
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.4	0	(1.053.019.256)
Koreksi Lain-lain	E.4.5	0	0
Jumlah Koreksi Ekuitas		0	(655.415.037)
Transaksi Antar Entitas	E.5	30.130.466.283	12.862.407.118
Ekuitas Akhir		35.669.658.569	33.091.966.468

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung. Sehingga terjalin kesinambungan dengan visi Mahkamah Agung RI yang menginginkan agar Makamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas_pokoknya.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampa 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikan Rencana Strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rencana Strategis yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan agar lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dihasilkan melaui aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yaitu aplikasi terintegrasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan oleh satuan kerja (satker) pemerintah untuk mengelola seluruh siklus keuangan negara secara digital, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dengan mengintegrasikan semua aplikasi keuangan sebelumnya ke dalam satu sistem terpadu dengan basis data tunggal (single database). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tinggi Bengkulu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- **Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.**

a. Aset Lancar

- **Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.**

- **Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.**

- **Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:**

  - **Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.**

  - **Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal**

- **Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:**

Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
    - Kewajiban Jangka Pendek

      Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

      Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 6 Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Perpajakan	**0**	**0**
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**30.343.000**	**30.343.000**
Hibah	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan dan Hibah	**30.343.000**	**30.343.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	**19.892.807.000**	**42.230.193.000**
Belanja Barang	**3.254.808.000**	**3.132.798.000**
Belanja Modal	**21.177.000.000**	**21.177.000.000**
Jumlah Belanja	**66.359.674.000**	**66.539.991.000**

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah: Rp. 197.979.400,-

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp197.979.400,- atau mencapai 652 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp30.343.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 7 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	**Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin**	**0**	**180.694.000**	**0**
2.	**Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan**	**30.343.000**	**0**	**0**
3.	**Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi**	**0**	**17.285.400**	**0**
	Total Pendapatan	30.343.000	197.979.400	652,47

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp176.455.998,- atau 819,83 persen dibandingkan periode yang sama TA 2025. Pada periode Semester I TA 2026 ini terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Akun 425122) sebesar Rp180.694.000,- yang seharusnya adalah Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan (Akun 425121) karena merupakan hasil dari lelang penjualan bongkaran gedung kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu. Kesalahan akun pada penyetoran pendapatan lelang penjualan bongkaran Gedung kantor Pengadilan Tinggi tersebut akan diajukan ralat akun ke KPPN Bengkulu pada periode Semester II TA 2026.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2026 dan 2025 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
				Rp.	%
1.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	180.694.000	7.817.000	172.877.000	2211,55
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
3.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0
4.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	17.285.400	13.706.402	3.578.998	26,11
	Total Pendapatan	197.979.400	21.523.402	176.455.998	819,83

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp30.307.774.434,-

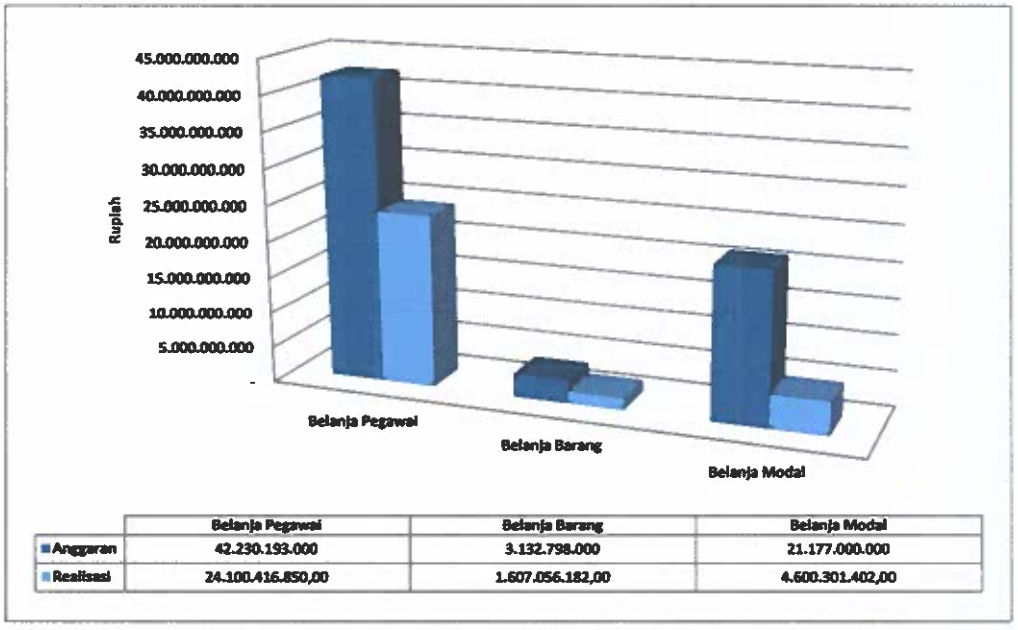
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp30.307.774.434,- setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 46% dari anggaran senilai Rp66.539.991.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	**42.230.193.000**	**24.100.416.943**	**57**
Belanja Barang	**3.132.798.000**	**1.607.056.182**	**51**
Belanja Modal	**21.177.000.000**	**4.600.301.402**	**22**
Total Belanja Bruto	66.539.991.000	30.307.774.527	46
Pengembalian Belanja	**0**	**93**	**0**
Total Belanja Netto	66.539.991.000	30.307.774.434	46

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)



	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
Anggaran	42.230.193.000	3.132.798.000	21.177.000.000
Realisasi	24.100.416.850,00	1.607.056.182,00	4.600.301.402,00

Sumber: Laporan Keuangan SAKTI Tahun 2026 & 2025

Realisasi Belanja Negara secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar Rp12.560.415.217,-. atau sebesar 108,84 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama di Tahun Anggaran 2026. Peningkatan tersebut antara lain karena adanya kenaikan Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara di akhir Tahun 2025.

Perbandingan realisasi belanja TA 2026 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	
			Rp.	%
Belanja Pegawai	24.100.416.850	11.540.001.633	12.560.415.217	108,84
Belanja Barang	1.607.056.182	1.321.978.887	285.077.295	21,56
Belanja Modal	4.600.301.402	0	4.600.301.402	
Total Belanja	30.307.774.434	12.861.980.520	17.445.793.914	135,64

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp24.100.416.850

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp24.100.416.850,- dan Rp11.540.001.633,-.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2026 mengalami peningkatan sebesar 108,84 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan Belanja Tunjangan Pejabat Negara yang direalisasikan pada Semester I TA 2026 ini.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.401.381.320	2.459.405.520	(58.024.200)	(2,36)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.082	30.985	(2.903)	(9,37)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	177.908.298	180.207.490	(2.299.192)	(1,28)
Belanja Tunj. Anak PNS	36.215.742	36.615.728	(399.986)	(1,09)
Belanja Tunj. Struktural PNS	53.640.000	53.640.000	0	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PNS	109.802.000	113.468.000	(3.666.000)	(3,23)
Belanja Tunj. PPh PNS	26.756.170	28.665.771	(1.909.601)	(6,66)
Belanja Tunj. Beras PNS	97.549.740	97.187.640	362.100	0,37
Belanja Uang Makan PNS	211.133.000	206.794.000	4.339.000	2,10
Belanja Tunjangan Umum PNS	31.410.000	28.450.000	2.960.000	10,40
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.206.750.000	613.500.000	593.250.000	96,70
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	4.280.737.566	1.508.956.247	2.771.781.319	183,69

Belanja Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	15.160.900.000	6.164.600.000	8.996.300.000	145,93
Belanja Gaji Pokok PPPK	216.745.775	51.257.600	165.488.175	322,86
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.962	932	4.030	432,40
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	14.067.619	0	14.067.619	0
Belanja Tunj. Anak PPPK	4.370.009	0	4.370.009	0
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8.480.000	8.480.000	0	0,00
Belanjo Tunjangan Beras PPPK	16.149.660	1.158.720	14.990.940	1293,75
Belanja Uang Makan PPPK	34.642.000	6.475.000	28.167.000	435,01
Belanja Tunj. Umum PPPK	11.745.000	0	11.745.000	0
Total Belanja Brutto	24.100.416.943	11.558.893.633	12.541.523.310	108,50
Pengembalian Belanja	93	18.892.000	(18.891.907)	(99,99)
Total Belanja Netto	24.100.416.850	11.540.001.633	12.560.415.217	108,84

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp. 1.607.056.182,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp1.607.056.182,- dan Rp1.321.978.887,-

Realisasi Belanja Barang TA 2026 mengalami peningkatan sebesar Rp285.077.295,- atau 21,56 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun 2025 pada periode yang sama. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya peningkatan Belanja Barang Operasional untuk biaya tenaga kerja Outsourcing serta adanya peningkatan Belanja Jasa untuk Beban Listrik yang tidak terdapat pada periode yang sama Tahun 2025.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	440.679.475	271.617.681	169.061.794	62,24
Belanja Barang Non Operasional	1.740.000	0	1.740.000	0,00
Belanja Barang Persediaan	21.027.570	22.112.400	-1.084.830	-4,91
Belanja Jasa	947.440.281	824.730.171	122.710.110	14,88
Belanja Pemeliharaan	122.500.668	129.255.903	-6.755.235	-5,23
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	73.668.188	74.262.732	-594.544	-0,80

Total Belanja Brutto	1.607.056.182	1.321.978.887	285.077.295	21,56
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	1.607.056.182	1.321.978.887	285.077.295	21,56

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal : Rp. 4.600.301.402,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025 adalah sebesar Rp4.600.301.402,- dan Rp. 0. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 14 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan & Mesin	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Modal Gedung & Bangunan	**4.600.301.402**	**0**	**4.600.301.402**	**0,00**
Belanja Modal Lainnya	**0**	**0**	**0**	**0,00**
Total Belanja Brutto	4.600.301.402	0	4.600.301.402	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	4.600.301.402	0	4.600.301.402	0

a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi tersebut pada TA 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan TA 2025.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2026 dan 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Tanah	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	**0**	**0**	**0**	**0**

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 adalah sebesar Rp14.850.000,-. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada satker Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2026 dan 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
			Rp.	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Meubelair)	**14.850.000**	**0**	**14.850.000**	**0**
————	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Belanja Brutto	14.850.000	0	14.850.000	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	14.850.000	0	14.850.000	0

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2026 dan TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp4.600.301.402,-. dan Rp.0. Rincian Belanja Modal dan Bangunan pada satker Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan *Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2026 dan 2025*

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	**4.585.451.402**	**0**	**4.585.451.402**	**0**
Total Belanja Brutto	4.585.451.402	0	4.585.451.402	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	4.585.451.402	0	4.585.451.402	0

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Rp Rp67.045.805,-

Nilai Aset Lancar per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp67.045.805,- dan Rp31.540.822,-. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 18 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2026 dan 2025

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025
Kas di Bendahara Pengeluaran	42.000.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Piutang Bukan Pajak	2.863.575	0
Persediaan	22.182.230	31.540.822
Total Aset Lancar	67.045.805	31.540.822

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp42.000.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp42.000.000,- dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 19 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1.	Saldo Uang Persediaan dari KPPN	42,000,000,-	0
	Jumlah	42,000,000	0

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas: Rp0

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Kas Lainnya dan Setara Kas

(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2026	31 Desember TA 2025
1.	----------	0	0
	Jumlah	0	0

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak: Rp2.863.575,-

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp2.863.575,- dan Rp.0 . Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Rincian Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2026

No.	Debitur	30 Juni 2026	31 Desember TA 2025
1.	Pendapatan Sewa Rumah Negara Bulan Juli 2025	2.863.575	0
	Jumlah Total	2.863.575	0

C.1.4. Persediaan

Persediaan : Rp22.182.230.-

Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp22.182.230,- dan Rp31.540.822,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk

barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember 2025

No	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	Barang Konsumsi	19.762.100	25.577.312
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	2.420.130	5.963.510
	Total	22.182.230	31.540.822

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp38.601.138.608,-

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 tersaji sebesar Rp38.601.138.608,- dan Rp33.988.013.622,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2026	TA 2025	Perubahan
1	Tanah	29.484.991.000	29.484.991.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.742.549.424	4.965.278.091	(222.728.667)
3	Gedung dan Bangunan	10.058.527.219	10.058.527.219	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	8.680.950	8.680.950	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.585.451.402	0	4.585.451.402
	Jumlah	48.880.199.995	44.517.477.260	4.362.722.735
	Akumulasi Penyusutan	(10.279.061.387)	(10.529.463.638)	250.402.251
	Nilai Buku Aset Tetap	38.601.138.608	33.988.013.622	4.613.124.986

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp29.484.991,-

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp29.484.991,- dan Rp29.484.991.000,-. Nilai Perolehan Aset berupa Tanah per 30 Juni 2026 tidak mengalami perubahan nilai jika dibandingkan dengan periode Tahun Anggaran 2025. Mutasi transaksi terhadap Tanah per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	29.484.991.000
Mutasi Tambah	
----------	0
Mutasi Kurang	
----------	0
Saldo per 30 Juni 2026	29.484.991.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	29.484.991.000

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 25 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m^2)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	2.01.01.01.002.1	1.195	A 1429085	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	491.231.0
2.	2.01.01.01.002.2	2.010	A 1429094	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	904.886.0
3.	2.01.01.01.002.3	1.933	A 1430646	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas KPT dan WKPT	4.747.422.0
4.	2.01.01.01.002.4	586	07.04.03.09.4.00011	Pemerintah RI cq. MARI	Rumah Dinas Hakim Tinggi	1.480.378.0
5.	2.01.01.04.001.1	8.958	07.04.03.04.4.00083	Pemerintah RI cq. MARI	Gedung Kantor PT Bengkulu	20.710.896.0
6.	2.01.02.02.002.1	1.015		Pemerintah RI cq. MARI	Tanah kosong yang diperuntukkan	1.152.178.0
Jumlah						29.484.991.0

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp4.742.549.424,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 dan 2025 masing-masing adalah sebesar Rp4.742.549.424,- dan Rp4.965.278.091,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	4.965.278.091
Mutasi Tambah	
Pembelian	14.850.000
Hibah Masuk	8.850.000
Transfer Masuk	10.780.000
Mutasi Kurang	
Dihentikan dari penggunaan operasional	259.088.666

Saldo per 30 Juni 2026	4.742.549.424
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(4.143.058.836)
Nilai Buku 30 Juni 2026	599.490.588

Mutasi nilai aset Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Mutasi tambah :

Pembelian berupa 3 Unit Meja Kayu senilai Rp9.600.000,-, 3 Unit Kursi Besi senilai Rp5.250.000,-

Perolehan Hibah Langsung berupa 3 Unit Printer senilai Rp4.850.000,-, 1 Unit Lambang burung Garuda senilai Rp4.000.000,-

Transfer Masuk dari Biro Urusan Administrasi Mahkamah Agung berupa 3 Unit Scanner senilai Rp10.780.000,-

Mutasi kurang :

Reklasifikasi keluar dari penghentian aset tetap dari penggunaan karena rusak berat senilai Rp259.088.666,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 10.058.527.219,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp10.058.527.219,- dan Rp10.058.527.219,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2025	10.058.527.219
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	**0**
Belanja Modal	**0**
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	**0**
Saldo per 30 Juni 2026	10.058.527.219
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	(6.136.002.551)
Nilai Buku 30 Juni 2026	3.922.524.668

Nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 sebesar Rp10.058.527.219,- tidak mengalami perubahan dibandingkan periode 31 Desember Tahun 2025.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp.0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	0
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai	**0**
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	**0**
Saldo 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp8.680.950,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp8.680.950,- dan Rp8.680.950,-.

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 sebesar Rp8.680.950,- terdiri dari Aset Monografi, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan periode 31 Desember 2025.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2025	8.680.950
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai	0
Penghapusan Aset	0
Saldo per 30 Juni 2026	8.680.950
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	0
Nilai Buku 30 Juni 2026	8.680.950

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp4.585.451.402

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.4.585.451.402. dan Rp.0. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan

adalah saldo Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan Pembangunan/renovasi Gedung kantor Pengadilan Tinggi Bengkulu.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. (10.705.321.007)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing Rp(10.705.321.007,-) dan Rp.(10.058.527.219,-).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah ini, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 26 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	29.484.991.000	0	29.484.991.000
2	Peralatan dan Mesin	4.742.549.424	(4.253.403.908)	489.145.516
3	Gedung dan Bangunan	10.058.527.219	(6.451.917.099)	3.606.610.120
4	Aset Tetap Lainnya	8.680.950	0	8.680.950
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.585.451.402	0	4.585.451.402
	Jumlah	48.880.199.995	(10.705.321.007)	38.174.878.988

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp6.997.665,- dan Rp0,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya per 30 Juni 2026 adalah berupa aset lain-lain.

Tabel 27 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	30 Juni 2026	31 Desember 2025
1	**Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah**	**261.095.480**	**2.006.814**
	Nilai perolehan Aset Lainnya	261.095.480	2.006.814
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(255.097.481)	(2.006.814)
	Nilai buku Aset Lainnya	5.997.999	0

C.3.1 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Rp261.095.480,-

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp261.095.480,- dan Rp2.006.814,- . Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2025	2.006.814
Mutasi Tambah	**259.088.666**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 30 Juni 2026	261.095.480

C.3.2 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainya

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya : Rp.255.097.481,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing (Rp255.097.481,-) dan (Rp2.006.814,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp.2.578.264.223,-

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp2.578.264.223,- dan Rp3.031.570.626,-. Kewajiban Jangka Pendek

merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Bengkulu per 30 Juni 2026 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 28 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni 2026	TA 2025
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.504.185.574	3.029.232.676
Utang yang Belum Ditagihkan	32.078.649	0
Pendapatan Diterima Dimuka	0	2.337.950
Uang Muka dari KPPN	42.000.000	0
Jumlah	2.578.264.223	3.031.570.626

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga: Rp2.504.185.574,-

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp2.504.185.574,- dan Rp3.029.232.676,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tinggi Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	2.504.185.574,-	Belanja Gaji Induk Bulan Juli 2026
	Jumlah	2.504.185.574,-	

C.4.2 Utang yang Belum Ditagihkan

Utang yang Belum Ditagihkan: Rp32.078.649,-

Jumlah Utang yang Belum ditagihkan per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp32.078.649,- dan Rp.0,- . Utang yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas penakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang yang Belum Ditagihkan Pengadilan Tinggi Bengkulu per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Utang yang Belum Ditagihkan
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1.	Kwitansi UP yang Belum SPP	32.078.649,-	Belanja Bulan Juni yang Dipertanggungjawabkan di Bulan Juli
	Jumlah	32.078.649,-	

C.4.4 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp.42,000,000,-

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 masing-masing adalah sebesar Rp.42,000,000,- dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.5. Ekuitas

Ekuitas: Rp35.669.658.569,-

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp35.669.658.569,- dan Rp30.987.983.818,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbP : Rp22.486.925,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp22.486.925,- dan Rp15.250.015,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 31 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
2.	Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	30.343.000	2.337.950	7,71
3.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	20.148.975	0
	Total Pendapatan	30.343.000	22.486.925	74,11

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp23.594.798.606

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp23.594.798.606,- dan Rp12.811.865.319,-.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 17 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.690.049.720	2.758.267.720	(68.218.000)	(2,47)
Beban Pembulatan Gaji PNS	31.311	34.760	(3.449)	(9,92)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	198.820.478	202.170.810	(3.350.332)	(1,66)
Beban Tunj. Anak PNS	40.412.990	41.289.402	(876.412)	(2,12)
Beban Tunj. Struktural PNS	58.320.000	60.345.000	(2.025.000)	(3,36)
Beban Tunj. Fungsional PNS	123.841.000	110.149.000	13.692.000	12,43

Beban Tunj. PPh PNS	27.215.748	29.242.957	(2.027.209)	(6,93)
Beban Tunj. Beras PNS	109.064.520	109.209.360	(144.840)	(0,13)
Beban Uang Makan PNS	211.133.000	206.302.000	4.831.000	2,34
Beban Tunjangan Umum PNS	35.290.000	31.965.000	3.325.000	10,40
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.394.250.000	688.500.000	705.750.000	102,51
Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	3.980.135.538	1.657.404.916	2.322.730.622	140,14
Beban Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	14.383.200.000	6.842.000.000	7.541.200.000	110,22
Beban Gaji Pokok PPPK	245.958.075	57.664.800	188.293.275	326,53
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.668	1.034	4.634	448,16
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	16.156.109	0	16.156.109	0,00
Beban Tunj. Anak PPPK	4.972.769	0	4.972.769	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPP	9.540.000	9.540.000	0	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	18.394.680	1.303.560	17.091.120	1311,1
Beban Uang Makan PPPK	34.642.000	6.475.000	28.167.000	435,01
Beban Tunj. Umum PPPK	13.365.000	0	13.365.000	0,00
Total Beban Pegawai	23.594.798.606	12.811.865.319	10.782.933.287	84,16

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp25.596.782,-

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp25.596.782,- dan Rp34.784.000,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	25.596.782	34.784.000	(9.187.218)	(26,41)
Total Beban Persediaan	25.596.782	34.784.000	(9.187.218)	(26,41)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang & Jasa : Rp1.371.623.888,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp1.371.623.888,- dan Rp1.125.889.688,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34 Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	398.166.615	259.126.956	139.039.659	53,66
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.975.000	3.681.600	4.293.400	116,62
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30.600.000	30.600.000	0	0,00
Beban Barang Operasional Lainnya	1.800.000	1.305.000	495.000	37,93
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2.290.000	0	2.290.000	0,00
Beban Langganan Telepon	594.302	556.332	37.970	6,83
Beban Langganan Air	5.759.200	3.607.000	2.152.200	59,67
Beban Sewa	825.257.550	826.212.800	(955.250)	(0,12)
Beban Jasa Lainnya	1.600.000	800.000	800.000	100,00
Total Beban Barang dan Jasa	1.371.623.888	1.125.889.688	245.734.200	21,83

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp142.525.707,-

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp142.525.707,- dan Rp177.515.351,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	**9.507.100**	**56.014.265**	**(46.507.165)**	**(83,03)**
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	**7.415.000**	**11.000.000**	**(3.585.000)**	**(32,59)**
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	**119.240.327**	**105.780.506**	**13.459.821**	**12,72**
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	**6.363.280**	**4.720.580**	**1.642.700**	**34,80**
Total Beban Pemeliharaan	142.525.707	177.515.351	(34.989.644)	(19,71)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp90.168.188,-

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp90.168.188,- dan Rp74.262.732,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	**88.218.188**	**73.312.732**	**14.905.456**	**20,33**
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	**1.950.000**	**950.000**	**1.000.000**	**105,26**
Total Beban Perjalanan Dinas	90.168.188	74.262.732	15.905.456	21,42

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp.0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp427.259.286,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp427.259.286,- dan

Rp456.341.331,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	110.345.072	133.370.774	(23.025.702)	(17,26)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	315.914.548	315.914.547	1	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	999.666	7.056.010	(6.056.344)	(85,83)
Jumlah Penyusutan	427.259.286	456.341.331	(29.082.045)	(6,37)
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	427.259.286	456.341.331	(29.082.045)	(6,37)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0.

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp180.694.000,-

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	180.694.0000	7.817.000	172.877.000	2211,55
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Total Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional	180.694.0000	7.817.000	172.877.000	2211,55

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2026 dan TA 2025
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2026	TA 2025	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp30.987.983.818

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp30.987.983.818,- dan Rp35.542.565.793,-.

E.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus(defisit) LO : Rp.(25.448.791.532)

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp(25.448.791.532) dan Rp(14.657.591.406). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi /Kesalahan mendasar : Rp.0.

Tidak terdapat transaksi dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026.

E.4. Koreksi Menambah/Mengurangi

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp.0.

Nilai Penyesuaian Nilai Aset per 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap : Rp.0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp(0)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.(0,-) dan Rp.(1.053.019.256,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 5 Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2026

Jenis Aset tetap	Nilai Koreksi
Reklasifikasi Masuk Gedung & Bangunan	0
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Gedung &Bangunan	(0)
Koreksi Pencatatan Gedung & Bangunan	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Jumlah	0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain : Rp.0

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi antar beban, koreksi antar hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 .

Rincian Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Utang	0
Koreksi Hibah	0
Total Koreksi Lain-lain	0

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas : Rp30.130.466.283,

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp30.130.466.283,- dan Rp12.862.407.118,-.

Rincian Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
per 30 Juni TA 2026
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	30.307.774.434
Diterima dari Entitas Lain	(197.979.400)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	11.821.249
Pengesahan Hibah Langsung	8.850.000
Jumlah	30.130.466.283

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar Rp.(197.979.400) sedangkan DKEL sebesar Rp.30.307.774.434,-.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. terdapat transaksi Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2026.

Tabel 48 Rincian Transfer Masuk
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	Entitas Asal	Nilai (Rp)
Scaner	Badan Urusan Administrasi MARI	11.821.249
----------	----------	0
Jumlah		0

Transfer keluar sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp.0,-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp8.850.000,- dari total Rp.8.850.000,- yang diterima sepanjang tahun 2026.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 adalah Rp.0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Pengesahan Hibah
(dalam satuan Rupiah)

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
R.Azharyadi P, SH.,MH	1 Unit Lambang Burung Garuda	4.000.000,-
Nursani,SH	1 Unit Printer	850.000,-
Arman Surya P,SH.,MH	2 Unit Printer	4.000.000,-
	Total Pengesahan	8.850.000
	Pengesahan Pengembalian Hibah	0
	Jumlah	0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2026 disajikan pada lampiran.

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp35.669.658.569

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp35.669.658.569,- dan Rp33.0911.966.468,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK yang dapat diungkapkan dalam laporan keuangan tahun ini maupun semester lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak Terdapat Pendapatan dan Belanja secara Akrual yang dapat dijabarkan pada Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional DIPA 400512 Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :
Rekening Virtual Account pada BRI Cabang Bengkulu A/653244005121000 A.n BPG 016 PENGADILAN TINGGI BENGKULU yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp0,-.
Nomor Surat Ijin (Perubahan Nama Rekening) dari KPPN : S-2732/WPB.12/KP.06/2020 Tanggal 16 Oktober 2020.

F.2.4. Revisi DIPA

Pada periode Semester I TA 2026 ini satker Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan Revisi DIPA yang ke 7. Adapun Revisi DIPA tersebut di antaranya adalah berupa revisi Halaman III DIPA, Revisi POK, Revisi Antar Pagu Anggaran.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat Informasi mengenai Ralat SPM yang dapat dilaporkan dalam laporan keuangan Semester I TA 2026.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

A. Data Capaian Output

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN periode Semester I TA 2026 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026

Kementerian/Lembaga : 005 Mahkamah gung
Unit Organisasi : 01 Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : 400512 Pengadilan Tinggi Bengkulu
Fungsi : 03 Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : 03.04 Peradilan
Program : 005.01.WA Program Dukungan Manajemen
Lokasi : 2600 Bengkulu

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung								
	Layanan Sarana Internal	15.000.000	14.850.000	99	3	3	Unit	100	Kegiatan telah terlaksana dan output telah tercapai
	Layanan Prasarana Internal	21.162.000.000	4.585.451.402	21,668	1	0	Unit	0	Kegiatan sedang berjalan dan telah dibayarkan Uang Muka
2	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding								
	Layanan Umum	1.440.000	1.440.000	100,00	1	1	Layanan	100	Kegiatan telah terlaksana dan output telah tercapai
	Layanan Perkantoran	45.361.251.000	25.705.733.125	56,67	1	1	Layanan	100	Kegiatan masih berjalan dan dalam proses pertanggungjawaban
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100,00	1	1	Dokumen	100	Kegiatan telah terlaksana dan output telah tercapai
	Subtotal	66.539.991.000	30.307.774.527	45,548					
	Penyesuaian Revisi DIPA ke7 Pengembalian Belanja		93						Belanja Pembulatan Gaji PNS

B. Data Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yang dapat dilaporkan pada lampiran Laporan Keuangan Semester I TA 2026 ini.

LAPORAN PENDUKUNG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **MAHKAMAH AGUNG 005**
ESELON I : **BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01**
SATUAN KERJA : **PENGADILAN TINGGI BENGKULU 400512**

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 3:38 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**30,343,000**	**197,979,400**	**167,636,400**	**652**	**24,906,000**	**21,523,402**	**3,382,598**	**86**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	30,343,000	197,979,400	167,636,400	652	24,906,000	21,523,402	3,382,598	86
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**30,343,000**	**197,979,400**	**167,636,400**	**652**	**24,906,000**	**21,523,402**	**3,382,598**	**86**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	66,539,991,000	30,307,774,434	(36,232,216,566)	46	22,415,708,000	12,861,980,520	9,553,727,480	57
1. Belanja Pegawai	42,230,193,000	24,100,416,850	(18,129,776,150)	57	19,505,182,000	11,540,001,633	7,965,180,367	59
2. Belanja Barang	3,132,798,000	1,607,056,182	(1,525,741,818)	51	2,910,526,000	1,321,978,887	1,588,547,113	45
3. Belanja Modal	21,177,000,000	4,600,301,402	(16,576,698,598)	22	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI BENGKULU 400512

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 3:38 PM

lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**66,539,991,000**	**30,307,774,434**	**(36,232,216,566)**	**46**	**22,415,708,000**	**12,861,980,520**	**9,553,727,480**	**57**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

BENGKULU, 28 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YURNI HENDARWATI, S.Pd
NIP. 197010121992032001

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (400512) PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 3:49 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	42,000,000	0	42,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	2,863,575	0	2,863,575	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,863,575	0	2,863,575	0.00
Persediaan	22,182,230	31,540,822	(9,358,592)	(29.67)
JUMLAH ASET LANCAR	**67,045,805**	**31,540,822**	**35,504,983**	**112.57**
ASET TETAP				
Tanah	29,484,991,000	29,484,991,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,742,549,424	4,965,278,091	(222,728,667)	(4.49)
Gedung dan Bangunan	10,058,527,219	10,058,527,219	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	8,680,950	8,680,950	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4,585,451,402	0	4,585,451,402	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(10,705,321,007)	(10,529,463,638)	(175,857,369)	1.67
JUMLAH ASET TETAP	**38,174,878,988**	**33,988,013,622**	**4,186,865,366**	**12.32**
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	261,095,480	2,006,814	259,088,666	12,910.45
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(255,097,481)	(2,006,814)	(253,090,667)	12,611.57
JUMLAH ASET LAINNYA	**5,997,999**	**0**	**5,997,999**	
JUMLAH ASET	**38,247,922,792**	**34,019,554,444**	**4,228,368,348**	**12.43**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,504,185,574	3,029,232,676	(525,047,102)	(17.33)
Utang Yang Belum Ditagihkan	32,078,649	0	32,078,649	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	2,337,950	(2,337,950)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	42,000,000	0	42,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**2,578,264,223**	**3,031,570,626**	**(453,306,403)**	**(14.95)**
JUMLAH KEWAJIBAN	**2,578,264,223**	**3,031,570,626**	**(453,306,403)**	**(14.95)**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	35,669,658,569	30,987,983,818	4,681,674,751	15.11
JUMLAH EKUITAS	**35,669,658,569**	**30,987,983,818**	**4,681,674,751**	**15.11**
JUMLAH EKUITAS	**35,669,658,569**	**30,987,983,818**	**4,681,674,751**	**15.11**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**38,247,922,792**	**34,019,554,444**	**4,228,368,348**	**12.43**

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

UNIT ORGANISASI : **(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

WILAYAH/PROVINSI : **(2600) BENGKULU**

SATUAN KERJA : **(400512) PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 3:49 PM

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

BENGKULU, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YURNI HENDARWATI, S.Pd

NIP. 197010121992032001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (400512) PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 3:45 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	22,486,925	15,250,015	7,236,910	47.455
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	22,486,925	15,250,015	7,236,910	47.455
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	22,486,925	15,250,015	7,236,910	47.455
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	23,594,798,606	12,811,865,319	10,782,933,287	84.164
Beban Persediaan	25,596,782	34,784,000	(9,187,218)	(26.412)
Beban Barang dan Jasa	1,371,623,888	1,125,889,688	245,734,200	21.826
Beban Pemeliharaan	142,525,707	177,515,351	(34,989,644)	(19.711)
Beban Perjalanan Dinas	90,168,188	74,262,732	15,905,456	21.418
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (400512) PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 3:45 PM

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	427,259,286	456,341,331	(29,082,045)	(6.373)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	25,651,972,457	14,680,658,421	10,971,314,036	74.733
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(25,629,485,532)	(14,665,408,406)	(10,964,077,126)	74.761
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	180,694,000	7,817,000	172,877,000	2,211.552
Pendapatan Pelepasan Aset	180,694,000	7,817,000	172,877,000	2,211.552
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	180,694,000	7,817,000	172,877,000	2,211.552
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(25,448,791,532)	(14,657,591,406)	(10,791,200,126)	73.622
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(25,448,791,532)	(14,657,591,406)	(10,791,200,126)	73.622

Keterangan :

FINAL

BENGKULU, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YURNI HENDARWATI, S.Pd

NIP. 197010121992032001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (400512) PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Tgl Data : 28/07/26 12:36 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 3:47 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	30,987,983,818	35,542,565,793	(4,554,581,975)	(12.81)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(25,448,791,532)	(14,657,591,406)	(10,791,200,126)	73.62
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(655,415,037)	655,415,037	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	397,604,219	(397,604,219)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(1,053,019,256)	1,053,019,256	(100)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	30,130,466,283	12,862,407,118	17,268,059,165	134.25
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	4,681,674,751	(2,450,599,325)	7,132,274,076	(291.04)
EKUITAS AKHIR	35,669,658,569	33,091,966,468	2,577,692,101	7.79

Keterangan :
FINAL

BENGKULU, 28 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YURNI HENDARWATI, S.Pd
NIP. 197010121992032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU
SATUAN KERJA : (400512) PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Tgl Data : 28/07/26 12:36 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 3:52 PM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	30,307,774,434
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	197,979,400	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	180,694,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	17,285,400
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,401,381,320	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,082	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	177,908,298	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36,215,742	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	53,640,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	109,802,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	26,756,170	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	97,549,740	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	211,133,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	31,410,000	0
3.0	511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,206,750,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	4,280,737,566	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	15,160,900,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	216,745,775	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,962	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	14,067,619	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	4,370,009	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	8,480,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	16,149,660	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	34,642,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	11,745,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	400,304,475	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,975,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,600,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,800,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21,027,570	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	113,481,146	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	704,485	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	6,397,100	0
3.0	522141	Belanja Sewa	825,257,550	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,600,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7,599,100	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : **(005) MAHKAMAH AGUNG**

UNIT ORGANISASI : **(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

WILAYAH/PROVINSI : **(2600) BENGKULU**

SATUAN KERJA : **(400512) PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

Tgl Data : 28/07/26 12:36 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 3:52 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,310,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	107,591,568	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,718,188	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,950,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14,850,000	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,585,451,402	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	93
JUMLAH			**30,505,753,927**	**30,505,753,927**

Keterangan :

FINAL

BENGKULU, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YURNI HENDARWATI, S.Pd

NIP. 197010121992032001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (400512) PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 3:50 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	42,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,863,575	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	19,762,100	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,420,130	0
0.0	131111	Tanah	29,484,991,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,742,549,424	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,058,527,219	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	8,680,950	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	4,585,451,402	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,253,403,908
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	6,451,917,099
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	261,095,480	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	255,097,481
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	2,504,185,574
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	32,078,649
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	42,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	30,307,774,434
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	197,979,400	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	11,821,249
0.0	391111	Ekuitas	0	30,987,983,818
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	8,850,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	180,694,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,337,950
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	20,148,975
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,690,049,720	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	31,311	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	198,820,478	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	40,412,990	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	58,320,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	123,841,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	27,215,748	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	109,064,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	211,133,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	35,290,000	0
3.0	511158	Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,394,250,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	3,980,135,538	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	14,383,200,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	245,958,075	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (2600) BENGKULU

SATUAN KERJA : (400512) PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Tgl Data : 28/07/26 12:42 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 3:50 PM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5,668	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	16,156,109	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	4,972,769	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9,540,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	18,394,680	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	34,642,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	13,365,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	398,166,615	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7,975,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30,600,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,800,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	2,290,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	97,281,221	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	594,302	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	5,759,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	825,257,550	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,600,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,507,100	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	7,415,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	119,240,327	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	88,218,188	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,950,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	110,345,072	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	315,914,548	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	999,666	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	25,596,782	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6,363,280	0
JUMLAH			**75,058,293,137**	**75,058,293,137**

Keterangan :

FINAL

BENGKULU, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YURNI HENDARWATI, S.Pd

NIP. 197010121992032001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2600**	**BENGKULU**
SATUAN KERJA	**: 400512**	**PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 28/07/26 4:03 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	180,694,000	0	180,694,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,343,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	17,285,400	0	17,285,400	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	30,343,000	197,979,400	0	197,979,400	652.47
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	30,343,000	197,979,400	0	197,979,400	652.47
	JUMLAH PENDAPATAN	30,343,000	197,979,400	0	197,979,400	652.47

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI	: 2600	BENGKULU
SATUAN KERJA	: 400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 28/07/26 4:02 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 28/7/26 4:00 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	207,689,000	4,209,844,000	2,401,381,320	0	2,401,381,320	57.04	1,808,462,680
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	58,000	58,000	28,082	93	27,989	48.26	30,011
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	378,292,000	47,292,000	177,908,298	0	177,908,298	376.19	(130,616,298)
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	69,910,000	29,910,000	36,215,742	0	36,215,742	121.08	(6,305,742)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	93,870,000	33,870,000	53,640,000	0	53,640,000	158.37	(19,770,000)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	371,204,000	51,204,000	109,802,000	0	109,802,000	214.44	(58,598,000)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	571,171,000	21,171,000	26,756,170	0	26,756,170	126.38	(5,585,170)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	188,081,000	188,081,000	97,549,740	0	97,549,740	51.87	90,531,260
511129	Belanja Uang Makan PNS	557,827,000	557,827,000	211,133,000	0	211,133,000	37.85	346,694,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	52,441,000	22,441,000	31,410,000	0	31,410,000	139.97	(8,969,000)
511158	Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1,065,210,000	2,400,000,000	1,206,750,000	0	1,206,750,000	50.28	1,193,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	3,555,753,000	7,561,698,000	4,352,574,352	93	4,352,574,259	57.56	3,209,123,741
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2,632,593,000	7,484,434,000	4,280,737,566	0	4,280,737,566	57.2	3,203,696,434
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	13,504,600,000	26,984,200,000	15,160,900,000	0	15,160,900,000	56.18	11,823,300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	16,137,193,000	34,468,634,000	19,441,637,566	0	19,441,637,566	56.4	15,026,996,434
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	88,995,000	88,995,000	216,745,775	0	216,745,775	243.55	(127,750,775)
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000	3,000	4,962	0	4,962	165.4	(1,962)
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,000	30,000	14,067,619	0	14,067,619	46,892.06	(14,037,619)
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	30,000	30,000	4,370,009	0	4,370,009	14,566.7	(4,340,009)
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	16,200,000	16,200,000	8,480,000	0	8,480,000	52.35	7,720,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,173,000	2,173,000	16,149,660	0	16,149,660	743.2	(13,976,660)
511628	Belanja Uang Makan PPPK	92,400,000	92,400,000	34,642,000	0	34,642,000	37.49	57,758,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	30,000	30,000	11,745,000	0	11,745,000	39,150	(11,715,000)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	199,861,000	199,861,000	306,205,025	0	306,205,025	153.21	(106,344,025)
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	19,892,807,000	42,230,193,000	24,100,416,943	93	24,100,416,850	57.07	18,129,776,150
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	788,740,000	731,965,000	400,304,475	0	400,304,475	54.69	331,660,525
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,000,000	18,000,000	7,975,000	0	7,975,000	44.31	10,025,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	73,440,000	73,440,000	30,600,000	0	30,600,000	41.67	42,840,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3,000,000	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 005	MAHKAMAH AGUNG
ESELON I	: 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI	: 2600	BENGKULU
SATUAN KERJA	: 400512	PENGADILAN TINGGI BENGKULU
JENIS SATUAN KERJA	: KD	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 28/07/26 4:02 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 28/7/26 4:00 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	883,180,000	825,205,000	440,679,475	0	440,679,475	53.4	384,525,525
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,100,000	1,740,000	1,740,000	0	1,740,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	66,400,000	69,600,000	21,027,570	0	21,027,570	30.21	48,572,430
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	66,400,000	69,600,000	21,027,570	0	21,027,570	30.21	48,572,430
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	264,960,000	211,968,000	113,481,146	0	113,481,146	53.54	98,486,854
522112	Belanja Langganan Telepon	24,000,000	24,000,000	704,485	0	704,485	2.94	23,295,515
522113	Belanja Langganan Air	12,000,000	12,000,000	6,397,100	0	6,397,100	53.31	5,602,900
522141	Belanja Sewa	961,160,000	961,160,000	825,257,550	0	825,257,550	85.86	135,902,450
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	4,000,000	1,600,000	0	1,600,000	40	2,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,266,120,000	1,213,128,000	947,440,281	0	947,440,281	78.1	265,687,719
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	324,610,000	333,379,000	7,599,100	0	7,599,100	2.28	325,779,900
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	100,000,000	95,000,000	7,310,000	0	7,310,000	7.69	87,690,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	352,998,000	335,346,000	107,591,568	0	107,591,568	32.08	227,754,432
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	777,608,000	763,725,000	122,500,668	0	122,500,668	16.04	641,224,332
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	252,200,000	252,200,000	71,718,188	0	71,718,188	28.44	180,481,812
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	7,200,000	1,950,000	0	1,950,000	27.08	5,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	259,400,000	259,400,000	73,668,188	0	73,668,188	28.4	185,731,812
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,254,808,000	3,132,798,000	1,607,056,182	0	1,607,056,182	51.3	1,525,741,818
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,000,000	15,000,000	14,850,000	0	14,850,000	99	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	15,000,000	15,000,000	14,850,000	0	14,850,000	99	150,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	21,162,000,000	21,162,000,000	4,585,451,402	0	4,585,451,402	21.67	16,576,548,598
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	21,162,000,000	21,162,000,000	4,585,451,402	0	4,585,451,402	21.67	16,576,548,598
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	21,177,000,000	21,177,000,000	4,600,301,402	0	4,600,301,402	21.72	16,576,698,598

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 005**	**MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I	**: 01**	**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI	**: 2600**	**BENGKULU**
SATUAN KERJA	**: 400512**	**PENGADILAN TINGGI BENGKULU**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 28/07/26 4:02 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 28/7/26 4:00 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA	44,324,615,000	66,539,991,000	30,307,774,527	93	30,307,774,434	45.55	36,232,216,566

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026

UAPB : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
UAKPB : 400512 **PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

Tgl Data : 29/07/26 9:36 AM
Tgl Cetak : 29/07/26 11:01 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker_pc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2026					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
					SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
131111	**Tanah**		**15,697**	**29,484,991,000**	**0**	**0**	**0**	**29,484,991,000**
20101	TANAH PERSIL	-	14,682	28,332,813,000	0	0	0	28,332,813,000
20102	TANAH NON PERSIL	-	1,015	1,152,178,000	0	0	0	1,152,178,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**770**	**4,742,549,424**	**(4,393,461,087)**	**140,057,179**	**(4,253,403,908)**	**489,145,516**
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	15	1,318,683,912	(1,318,683,912)	0	(1,318,683,912)	0
30501	ALAT KANTOR	-	98	286,435,662	(333,324,662)	56,949,000	(276,375,662)	10,060,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	549	1,439,121,796	(1,401,489,943)	125,412,164	(1,276,077,779)	163,044,017
30601	ALAT STUDIO	-	12	248,141,000	(140,723,500)	(21,083,500)	(161,807,000)	84,334,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	3	27,096,100	(26,793,490)	(302,610)	(27,096,100)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	1	396,500,000	(158,600,000)	(19,825,000)	(178,425,000)	218,075,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	62	779,297,955	(795,636,705)	16,338,750	(779,297,955)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	29	248,472,999	(217,408,875)	(17,431,625)	(234,840,500)	13,632,499
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	800,000	(800,000)	0	(800,000)	0
133111	**Gedung dan Bangunan**		**13**	**10,058,527,219**	**(6,136,002,551)**	**(315,914,548)**	**(6,451,917,099)**	**3,606,610,120**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	5	7,742,706,219	(4,433,809,508)	(261,005,093)	(4,694,814,601)	3,047,893,618
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	8	2,315,819,000	(1,702,193,043)	(54,909,455)	(1,757,102,498)	558,716,502
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**401**	**8,680,950**	**0**	**0**	**0**	**8,680,950**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	401	8,680,950	0	0	0	8,680,950
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**144**	**261,095,480**	**(2,006,814)**	**(253,090,667)**	**(255,097,481)**	**5,997,999**
30501	ALAT KANTOR	-	4	61,676,814	(1,206,814)	(60,470,000)	(61,676,814)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	136	167,617,866	(800,000)	(160,819,667)	(161,619,667)	5,997,999
31001	KOMPUTER UNIT	-	3	29,455,000	0	(29,455,000)	(29,455,000)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	1	2,346,000	0	(2,346,000)	(2,346,000)	0
JUMLAH			**17,025**	**44,555,844,073**	**(10,531,470,452)**	**(428,948,036)**	**(10,960,418,488)**	**33,595,425,585**

BENGKULU, 29 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG

YURNI HENDARWATI, S.Pd.
197010121992032001

B. INFORMASI HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA

REKAPITULASI DATA PENERIMAAN HIBAH TINGKAT WILAYAH BENGKULU
UNTUK BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN JUNI 2026

Bagian Anggaran : Mahkamah Agung RI
Eselon : Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : (400512) Pengadilan Tinggi Bengkulu

	GENERAL INFORMATION			LINE MINISTRY											DONOR							
NO	REGISTRATION NUMBER	PROJECT NAME	CODE SATKE	CASH DISBURSEMENT IN BANK ACCOUNT CURRENT YEAR				DISBURSEMENT CURRENT YEAR (SPHL/MPHLBJS)							DISBURSEMENT CURRRENT YEAR							
				VALUE DATE	CURRENCY	AMOUNT	ACCOUNT NUMBER	DATE OF AUTHORIZATION	CSH	GOODS/SERVICES			NO SPHL/MPHLBJS		VALUE DATE	UANG		GOODS/SERVICES			NO. BAST	
									IDR	CURRENCY	FOREIGN CURR	IDR				CURRENCY	AMOUNT	CURRENCY	FOREIGN CURR	IDR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	20	21	
NO	NO REGISTER	NAMA PROJECT	KODE SATKER	PENERIMAAN UANG MASUK REKENING TAHUN INI				PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/MPHLBJS)							PEMBERIAN HIBAH TAHUN INI							
				TANGGAL PENERIMAAN HIBAH	MATA UANG	NILAI	NO REKENING	TANGGAL PENGESAHAN	UANG	BARANG/JASA			NO SPHL/MPHLBJS		TANGGAL PEMBERIAN HIBAH	UANG		BARANG/JASA			NO. BAST	
									IDR	MATA UANG	VALAS	IDR				MATA UANG	NILAI	MATA UANG	VALAS	IDR		
1	2V1784BA	Pemberian Hibah Barang berupa 2 Unit Printer Canon PIXMA G2730 Milik Arman Surya Putra, S.H.,M.H	400512	-	-	-	-	04/05/2026	-	-	-	Rp 4.000.000	8238623671006048948		-	-	-	-	-	-	45/SEK.PT.W8-U1/PL1.2.4/I/2026	
2	2GMLPVEA	Pemberian Hibah Barang berupa 1 Unit Lambang Burung Garuda / Kayu Jati Milik R. Azharyadi, S.H., M.H.	400512	-	-	-	-	04/05/2026	-	-	-	Rp 4.000.000	8238627591006048949		-	-	-	-	-	-	44/SEK.PT.W8-U1/PL1.2.4/I/2026	
3	2KRT337A	Pemberian Hibah Barang berupa 1 Unit Printer PIXMA MG2570S Milik H. Nursani, S.H	400512	-	-	-	-	04/05/2026	-	-	-	Rp 850.000	8238626251006048951		-	-	-	-	-	-	43/SEK.PT.W8-U1/PL1.2.4/I/2026	
JUMLAH												Rp 8.850.000										

Bengkulu, 2 Juli 2026
Plt. Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu

Yeni Hendriwati, S.Pd
NIP. 197001121992032001

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE SEMESTER I TA 2026

Kode BA dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung
Kode Es1 dan Nama Es1: (01) Badan Urusan Administrasi
Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (2600) Bengkulu
Kode Satker dan Nama Satker : (400512) Pengadilan Tinggi Bengkulu

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. ***Jika tidak ada data, isi dengan N/A***			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, ***agar diuraikan pada lembar lampiran***			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok *(Hardcopy)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE *face*	√		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN MONSAKTI&LK			
	Sama	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan SAKTI&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2025?	√		Sama
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca *Balance*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah Satker Neracanya tidak *balance* ?		√	Tidak
Saldo antar Laporan	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Apakah Nilai *"Surplus/(Defisit)-LO"* di LO = Nilai *"Surplus/ (Defisit) - LO"* di LPE	√		Sama
3. Apakah Saldo *"Ekuitas Akhir"* di LPE = *"Saldo Ekuitas"* di Neraca	√		Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ?		√	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"?		√	Tidak
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		√	Tidak
2 Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? *(Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)*		√	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi **dibayar dimuka *(prepaid)***		√	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 **Uang Muka Belanja** Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak

AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain **Yang Masih Harus Dibayar**		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (*Cek di Neraca Percobaan saldo awal*)		√	Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2025? (*untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2025)*	N/A		Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 **tidak sama** saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		N/A	Tidak
Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?	N/A		Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Ya
4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		√	Ada/Tidak
5. Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	N/A		Ya
6. Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	N/A		Ya
saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi MyIntress			

Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)	
1. Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk	0
Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?	
2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	-11.821.249

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan *kecuali BA.015.04 ?*		√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru *(Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)*	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak

Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, *misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan*		√	Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? *seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)*		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? *(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?*		N/A	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal ?		N/A	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			0
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			0
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			-
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.			
5 Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar *dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya".*			
6. Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?		√	Ya/Tidak
7. Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	N/A		Ya

LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak

Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (*saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi*)		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang ***dapat*** *bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).*

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang *sesuai Perdirjen 43/2015*	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* - Saldo Akhir Penyisihan Piutang *(Jk.Pendek dan Jk.Panjang)* = Beban Penyisihan Piutang LO	N/A		Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak

Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.

2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	N/A		Ya

Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar jurnal" di Aplikasi MyIntress kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)

3. Dari kolom perbandingan antara 30 Juni 2026 dengan 31 Desember 2025 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2025, Apakah demikian?	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	N/A		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	N/A		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	N/A		Ada
Pengecekan persediaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan		√	Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?	N/A		Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?	N/A		Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN

Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	**Ya/Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal & LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Juni 2026 di MyIntress&LK?		√	Tidak
3. Apakah menurut Monsakti-Ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Modul Aset ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	N/A		Ya

MENU DAFTAR BMN	Seharusnya	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		-	
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		0	
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)		-	
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)		0	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus?		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja *"tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?*		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2025 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	√		
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	√		
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2026			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara *Stock Opname* Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	√		Ya
5. Adakan PNBP digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	N/A		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	N/A		Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	**Ya/Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	N/A		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	N/A		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	N/A		Ada
Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	N/A		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya
9 Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?	N/A		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	N/A		Ya
3 Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2026 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2026	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (***rumus perhitungan beban persediaan terlampir***)	√		Ya

Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak
1. Apakah terdapat pengungkapan atas *Refocussing* kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19		√
2. Jika terdapat *Refocussing* kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp0	
3 Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		√
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	**Ada**	**Tidak**
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√

9.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas		**Ada**	**Tidak**
10.	Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		√
11.	Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		√
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca		**Ada**	**Tidak**
12.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		N/A
	b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		N/A
	c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		N/A
	d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		N/A
13.	Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		
	a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		N/A
	b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		N/A

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan Monsakti&LK"

Mengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,

Yurhi Hendarwati, S.Pd

NIP. 197010121992032001

Bengkulu, 22 Juli 2026

Penelaah,

Rina Astuti, SE

NIP. 197308302006042015